

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Hubungan Internasional merupakan interaksi antara aktor-aktor yang tindakan/tindakannya atau kondisi kondisinya memiliki konsekuensi akibat yang penting bagi pihak lain diluar yurisdiksi efektif unit politik (negara) mereka yang didefinisikan oleh Steve Chan.<sup>1</sup> Liberalisme berasumsi bahwa hubungan internasional lebih bersifat kooperatif daripada konfliktual serta percaya terhadap kemajuan. Liberalisme juga memandang bahwa negara pada hakikatnya dibentuk oleh manusia, oleh karena itu negara memiliki dasar yang sama dengan manusia. Liberalisme cenderung memiliki pandangan optimistis. Dimana ketika manusia melakukan kerjasama maka bukan hanya untuk mendapatkan situasi yang menguntungkan, tetapi dapat juga membawa kondisi ketergantungan dan meminimalisir perang. Hal ini yang sebenarnya membawa hubungan internasional ke arah yang lebih baik.<sup>2</sup>

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Indonesia dikenal sebagai sebuah negara yang memiliki prospek yang sangat besar di Asia dengan konsep pembangunan yang sudah tertata rapi. Sektor minyak dan gas menjadi sebuah sektor yang sangat diandalkan oleh pemerintah saat itu yang dimana berada pada kisaran 82% dari total ekspor Indonesia.<sup>3</sup> Dalam masa pemerintahan Soeharto itupula, dikenal sebuah konsep pembangunan yang dinamakan Repelita (Rencana

---

<sup>1</sup> Ambarwati & Subarno Wijatmadja, Pengantar Ilmu Hubungan Internasional, (Malang: Intrans Publishing, 2016), P. 5.

<sup>2</sup> Jackson, Robert dan Sorensen, Georg. 2005. Pengantar Studi Hubungan Internasional, diterjemahkan oleh Dadan Suryadipura dari Introduction to International Relations, Oxford: Oxford University Press, 1999. (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2005)

<sup>3</sup> *Ibid*, hal. 8.

Pembangunan Lima Tahun) yang dimana setiap lima tahunnya Indonesia memiliki prioritas masing-masing dalam hal pembangunannya.<sup>4</sup>

Pada Repelita IV yaitu yang terjadi pada tahun 1984-1989, yang dibarengi dengan jatuhnya harga minyak dunia. Pemerintahan saat itu memutuskan untuk meningkatkan tujuannya untuk memprioritaskan investasi asing dan swasta. Hal ini kemudian mendorong pada meningkatnya angka investasi terutama dalam hal penyediaan jasa transportasi yang memang menjadi salah satu prioritas pembangunan pada masa Repelita IV tersebut. Hal itu kemudian berdampak sangat positif yang dimana ditunjukkan oleh angka pertumbuhan sekitar 9,5% dalam hal transportasi dan industri.<sup>5</sup>

Pada tahun 1997, krisis besar menerpa negara-negara yang berada dikawasan Asia, hal itu diakibatkan oleh turunnya harga komoditas ekspor seperti minyak dan gas. Indonesia sebagai salah satu negara yang sangat bergantung pada hasil ekspor dari komoditas tersebut tentunya mendapat dampak yang cukup besar. Pada masa itu bersama dua negara lainnya yaitu Thailand dan Korea Selatan mengalami defisit dalam neraca perdagangannya yang memaksa ketiga negara ini mengambil tindakan untuk melakukan pinjaman luar negeri demi menjaga nilai tukar yang tetap.<sup>6</sup> Hingga ketika Amerika Serikat kemudian memutuskan untuk menaikkan suku bunga acuan untuk menghindari inflasi di negaranya, akhirnya membuat komoditi ekspor utama dari Asia mengalami penurunan nilai dan berdampak pada hutang yang dipinjam dalam nilai dollar mengalami peningkatan nilai karena kebijakan Amerika Serikat tadi dan Rupiah mengalami krisis yang

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 8.

<sup>5</sup> *Ibid*, hal. 10

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 10.

ditunjukkan oleh anjloknya nilai Rupiah dari angka kisaran Rp.2000/USD merosot drastis hingga Rp.16.000/USD.<sup>7</sup>

Pada tahun 1998, Soeharto kemudian harus menyerahkan jabatannya dikarenakan oleh desakan mahasiswa yang saat itu menduduki gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan agenda memaksa Soeharto untuk turun dari jabatannya sebagai presiden Republik Indonesia. Wakil presiden saat itu B.J. Habibie kemudian menggantikan Soeharto untuk menjabat sebagai presiden Republik Indonesia. Mulai saat itu Indonesia sering melakukan beberapa pergantian presiden sehingga membuat kondisi pasca krisis 1997 tak kunjung membaik. Habibie, Abdurrahman Wahid, Megawati Soekarno Putri secara berturut-turut menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sebelum akhirnya pada tahun 2004 kursi Presiden ditempati oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang mana merupakan presiden pertama yang terpilih secara langsung.

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau yang sering disingkat SBY ini membuat sebuah konsep pembangunan yang salah satu agenda didalamnya adalah untuk memprioritaskan membentuk iklim investasi yang baik di dalam negeri agar menarik investor asing untuk menanamkan modalnya.<sup>8</sup> Dari situ dapat dilihat bahwa setelah masa orde baru yang dipimpin oleh Soeharto, agenda pembangunan yang melibatkan investasi asing mulai kembali digalakkan. Sebenarnya pada tiga presiden sebelumnya investasi asing juga menjadi salah satu tumpukan dalam pembangunan nasional akan tetapi tidak terlalu menjadi fokus utama karena pasca berakhirnya masa orde baru, ketiga presiden terfokus pada masalah reformasi dan isu-isu

---

<sup>7</sup> Ibnu Putra dan Hamidi, *Arah Pembangunan Indonesia dan Capaian Pelaksanaan RPJMN 2004-2009*, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses dari

[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3560](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3560), pada tanggal 9 Februari 2018.

<sup>8</sup> Ibnu Putra, Hamidi dan Prima, *Strategi Menuju Indonesia yang Lebih Baik*” Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, diakses dari

[http://www.setneg.go.id/index.php?option=com\\_content&task=view&id=3560](http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3560), pada tanggal 9 Februari 2018.

sosial yang dianggap lebih penting. Hal lain yang mendukung kenyataan tersebut adalah turunnya nilai PMA, yang dimana pada tahun 1997 nilainya sebesar USD 33,7 milyar dengan 778 unit proyek, pada tahun 2003 turun menjadi USD 14 milyar dengan jumlah proyek 1.170 unit dan sampai dengan November 2004, nilai PMA tercatat sebesar USD 9,6 milyar dengan 1.066 unit proyek.<sup>9</sup>

Pada Undang-Undang nomor 25 tahun 2007, penanaman modal asing atau PMA didefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.<sup>10</sup>

Keseriusan pemerintahan SBY dalam rangka memperbaiki iklim investasi untuk menarik investor asing ini dituangkan dalam RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2004-2009. Dalam dokumen tersebut terdapat salah satu poin yaitu pada bab 17 tentang peningkatan investasi dan ekspor non migas. Dalam dokumen tersebut tertuang tentang rencana pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi para investor asing, pemberian jaminan kepastian berusaha dan keamanan investasi, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, sarana dan prasarana yang menunjang, serta peraturan yang konsisten.<sup>11</sup> Hal itu kemudian tampak memberikan hasil yang cukup baik bagi iklim investasi di Indonesia yang terbukti dengan diberikannya peringkat investment grade (BBB) oleh Japan Credit Rating (JCR) Agency pada Juli

---

<sup>9</sup> Mudrajad Kuncoro, *Menanti Reformasi Iklim Investasi/Bisnis di Indonesia*, Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, diakses dari [http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Capitalism&Market/publications\\_menanti-iklim-investasi-bisnis.pdf](http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Capitalism&Market/publications_menanti-iklim-investasi-bisnis.pdf), pada tanggal 9 Februari 2018.

<sup>10</sup> UU no.25 tahun 2007, diakses dari [www.esdm.go.id/batubara/doc\\_download/3-undang-undang-nomor-25-tahun-2007.html](http://www.esdm.go.id/batubara/doc_download/3-undang-undang-nomor-25-tahun-2007.html) pada tanggal 9 Februari 2018.

<sup>11</sup> Dokumen RPJMN 2004-2009 bagian IV.24-6 tentang *Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro*, diakses melalui [www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJMN2004-2009.pdf](http://www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJMN2004-2009.pdf), pada tanggal 10 Februari 2018.

2010, kemudian disusul oleh Fitch pada Desember 2011, Moodys pada Januari 2012 dan Rating and Investment Information (R&I) pada Oktober 2012.<sup>12</sup>

Pada tahun 2014, pemilu presiden kembali diadakan dan dimenangkan oleh Joko Widodo yang kemudian menjadi presiden Republik Indonesia ke tujuh. Dalam masa pemerintahan presiden Jokowi ini, pembangunan sarana transportasi baik itu transportasi darat maupun laut menjadi prioritas utama di masa awal-awal pemerintahannya. Hal itu terbukti dengan digalakkannya konsep tol laut dan pembangunan jalur kereta di pulau Sulawesi dan penambahan jalur di pulau Sumatera serta pengadaan kereta cepat antara Bandung dan Jakarta. Dalam masalah pengadaan kereta cepat ini, ada satu hal yang kemudian menjadi sorotan yaitu dimenangkannya China sebagai investor yang melaksanakan proyek tersebut ketimbang Jepang yang dimana sudah sangat lama menjadi partner Indonesia dalam hal pembangunan infrastruktur semacam itu. Hal itu membuat pihak Jepang kecewa, seperti apa yang dinyatakan oleh pihak Jepang melalui perdana menterinya Shinzo Abe.<sup>13</sup>

Dengan sebuah ambisi besar untuk melakukan pembangunan besar-besaran yang merata terutama dalam bidang transportasi di semua lini, Indonesia kembali dihadapkan pada sebuah masalah yaitu penurunan nilai tukar Rupiah yang semakin hari semakin memburuk karena penguatan Dollar Amerika. Hal itu kemudian memaksa pemerintah untuk mengeluarkan paket kebijakan ekonomi untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dalam negeri demi mengatasi perlambatan ekonomi dan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi

---

<sup>12</sup> Ringkasan Eksekutif, *Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIBII (2009-2014)*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Hal. 12, diakses melalui <http://www.bappenas.go.id/files/1.%20RINGKASAN%20EKSEKUTIF.pdf>, pada tanggal 10 Februari 2018.

<sup>13</sup> *Abe expresses disappointment over high-speed rail to Jokowi*, diakses melalui <http://www.todayonline.com/world/asia/abe-expresses-disappointment-over-high-speed-rail-jokowi>, pada tanggal 11 Februari 2018.

nasional.<sup>14</sup> Dalam hal investasi, pada paket kebijakan tersebut diatur tentang kemudahan yang diberikan seperti pemberian layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam kurun waktu tiga jam di kawasan industri melalui peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan peraturan pemerintah mengenai kawasan industri serta peraturan Menteri Keuangan.<sup>15</sup> Banyak hal yang kemudian diatur oleh pemerintah yang sampai hari ini tercatat sudah mengeluarkan sepuluh paket kebijakan.

Dalam perkembangan terbarunya, pemerintah baru saja mengeluarkan sebuah kebijakan untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dimana, pada kebijakan baru tersebut pemerintah membuka sektor-sektor yang sebelumnya sengaja diproteksi untuk melindungi sektor industri dalam negeri. Dalam peraturan tentang DNI tersebut, pemerintah membuka sektor-sektor industri tertentu kepada investor dari luar negeri dengan tujuan bahwa sektor-sektor tersebut dapat lebih berkembang dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi nasional.

Kebijakan penanaman modal asing (PMA) didukung karena penanaman modal sangatlah signifikan dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Dari segi manfaatnya ada dua akibat dari penanaman modal yang menguntungkan Indonesia. Pertama, meningkatnya pendapatan rill. Kedua, adanya manfaat yang tidak langsung, seperti diperkenalkannya teknologi dan pengetahuan yang baru. Selain itu penanaman modal juga berfungsi untuk memperbesar devisa Indonesia melalui ekspor produksi Indonesia keluar negeri.

Berkembangnya perusahaan multi nasional disuatu negara sangatlah berpengaruh terhadap Ekonomi Negara itu sendiri dimana pengangguran akan berkurang sehingga pendapatan negara itu sendiri otomatis akan bertambah. Dalam rangka membantu perubahan terhadap negara khususnya

---

<sup>14</sup> Ahmad Asep Saefuloh, "Paket Kebijakan Ekonomi dan Agenda Lanjutan", *Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik*, Vol. VII, No. 20/II/P3D1/Ocktober/2015.

<sup>15</sup> *Ibid*, hal. 14.

Indonesia perkembangan perusahaan multi nasional merupakan prioritas utama dalam pembangunan negara. Maka pembangunan ini memerlukan konsep yang sangat bagus agar tujuan-tujuan tercapai semua. Dengan demikian unsur pemerintahan merupakan hal yang penting sebelum mengarah kepada perusahaan itu sendiri.

Berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka sangatlah penting untuk diadakan sebuah penelitian untuk melihat seperti apa kebijakan pemerintah dalam hal pengaturan investasi asing di Indonesia dengan mengangkat judul **“Pengaruh Implementasi Kebijakan Investasi Asing Terhadap Kehadiran Perusahaan MNC Di Indonesia”**.

Melalui penelitian ini pula, nantinya akan menguraikan dengan jelas seluruh kebijakan yang terkait investasi asing tersebut sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami tentang pentingnya investasi asing dalam hal pembangunan suatu negara dan pengaruhnya terhadap kehadiran perusahaan MNC di Indonesia.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan, Maka penulis Mengajukan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Kebijakan Pemerintah dalam meningkatkan indeks investasi Indonesia?
2. Bagaimana Pengaruh Perusahaan Multi Nasional terhadap suatu negara?
3. Bagaimana Kebijakan Investasi Asing dapat berpengaruh terhadap kehadiran Perusahaan MNC di Indonesia?
4. Bagaimana Dampak Perusahaan Multi Nasional Terhadap Pembangunan Ekonomi Nasional?

### **1.2.1 Pembatasan Masalah**

Adapun dalam penelitiannya, penulis akan membatasi masalah tersebut dalam segi aspeknya, penulis hanya memfokuskan tentang kebijakan-kebijakan terkait investasi asing sampai dengan paket kebijakan ekonomi jilid X (sepuluh) yang dimana di dalamnya tercantum kebijakan tentang revisi daftar negatif investasi atau yang biasa disingkat DNI. Serta membahas dampak dan pengaruh yang timbulkan oleh masuknya perusahaan MNC di Indonesia.

### **1.2.2 Perumusan Masalah**

Setelah melalui pemaparan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penulis kemukakan di atas, maka untuk memperjelas masalah yang di teliti,

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut **“Bagaimana Implementasi Kebijakan Investasi Asing Dapat Berpengaruh Terhadap Perekonomian Di Indonesia?”**

## **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu usaha memperdalam pemahaman dan pengetahuan akan suatu permasalahan dengan menggunakan cara-cara yang sistematis dan metodologis. Tujuan penelitian berkaitan dengan penelaahan-penelaahan serta bidang yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan tentang kebijakan investasi asing yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam hal meningkatkan jumlah investasi yang masuk secara khusus dan secara umum untuk memperbaiki indeks kemudahan berinvestasi ke Indonesia.
2. Menjelaskan tentang bagaimana kebijakan investasi asing yang dikeluarkan oleh pemerintah tersebut berpengaruh terhadap kehadiran perusahaan MNC di Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh Perusahaan Multi Nasional terhadap suatu Negara.
4. Untuk mengetahui dampak Perusahaan Multi Nasional terhadap pembangunan Ekonomi Nasional.

### **1.3.2 Kegunaan Penelitian**

Kegunaan dari penelitian ini adalah antara lain untuk memberikan manfaat kepada pembaca, mahasiswa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat Menjadi sumber informasi tentang seperti apa kebijakan-kebijakan pemerintahan Indonesia yang terkait dengan investasi asing dan apa alasan dari dikeluarkannya kebijakan tersebut.
- b. Memberikan informasi kepada para pengkaji hubungan internasional terutama yang berfokus pada ekonomi politik internasional tentang seperti apa proses-proses politik di suatu negara dapat berdampak pada ekonomi dari negara itu sendiri serta bagaimana proses tersebut dapat turut berpengaruh terhadap hubungan bilateral suatu negara dengan negara lain.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah kemampuan dalam berpikir dan sebagai media untuk meningkatkan kemampuan penalaran, pengetahuan dan teori yang telah diperoleh selama belajar di perguruan tinggi.
- d. Sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian Skripsi Sarjana Strata (S-1) pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan.